



MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT JENDERAL PERUBAHAN DARAT

REJAN JANUARI

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN		KEGIYATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	TARGET BULAN-1		REALISASI BULAN-1		% CAPAIAN BULAN-1		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB		
			(A)	(B)				TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA %	CAPAIAN ANGGARAN %					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
1	SP1 Meningkatkan Konektivitas Transportasi Nasional	RP 1 Basis Konektivitas Transportasi Darat	rasio	0,946	JALAN • Subsidi Angkutan Antarmoda untuk mendukung KSPN • Monitoring Angkutan Antarmoda untuk mendukung KSPN • Subsidi Angkutan Jalan Perintis • Trayek ADAP yang dilayani • Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan • Survey Usulan Trayek Baru Keperintisan Angkutan Jalan • Subsidi Perawatan Buy The Service • Terminal Tipe A (Pembangunan + Operasional) Pusat + Balai • Terminal Barang (Pembangunan + Operasional) • Fasilitas (Pusat + Balai) SUNGAI, DANAU & PENYEBERANGAN • Pelembagaan (Pembangunan Baru, Lanjutan dan Rehabilitasi) • Subsidi Angkutan Penyeberangan Perintis • Rehabilitasi Kapal Penyeberangan Fisik Baling • Subsidi Re-ka Long Distance Ferry Patimban - Banjarmasin dan Patimban - Pontianak	Rasio Konektivitas Transportasi Darat	0,946	0,946	100%	Rp 2.654.181.480,102	100%	0,957	Rp 250.377.614,018	101,65%	9,43%	• Dit. Angkutan Jalan • Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap trayek dan subsidi angkutan perintis, trayek angkutan ADAP dan trayek angkutan ALBN • Pengembangan trayek ALBN tergantung pada perjanjian kerjasama antar dua negara • Kondisi infrastruktur jalan di Indonesia masih tertinggal dengan negara yang berbatasan dengan Indonesia • Jumlah operator yang mau melayani pada trayek ALBN masih terbatas • Pelayanan trayek keperintisan angkutan jalan saat ini berdasarkan usulan dari Pemerintah Daerah dimana lokasi yang diusulkan adalah daerah yang belum terlayani oleh angkutan umum kota, namun belum mengkonstruksi daerah IT (Terdapan, Terlayani, Tertinggal) • Pelayanan keperintisan angkutan jalan belum dapat dilaksanakan secara maksimal dikarenakan kondisi geografis (seperti pegunungan atau dataran tinggi) dan akses jalan yang belum memadai • Kendaraan operasional angkutan jalan perintis sebagian besar sudah mencapai umur teknis sehingga perlu diremajakan dan kendaraan yang digunakan tidak sesuai dengan akses jalan yang dilalui • Terbatasnya aksesibilitas dan konektivitas antarmoda transportasi di beberapa wilayah KSPN, yang dapat menghambat aksesibilitas wisatawan menuju ke destinasi angkutan antarmoda KSPN atau destinasi wisata lainnya di daerah tersebut • Adanya resistensi dari angkutan umum yang diawasi angkutan antarmoda • Kurangnya sosialisasi dan promosi terhadap keberadaan angkutan antarmoda • Tingginya harga tiket pesawat domestik menyebabkan berkurangnya kedatangan wisatawan domestik dari luar provinsi • Kurangnya event yang diadakan di destinasi wisata tujuan layanan angkutan KSPN • Kurangnya pengawasan dan kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh operator • Dit. Perairan TI • Masih adanya pembangunan dan revitalisasi Terminal Pemungup Tipe A yang	• Dit. Angkutan Jalan • Mulai tahun anggaran 2022, anggaran pembangunan angkutan antarmoda KSPN menjadi besaran BPTD di wilayah KSPN terkait, hal ini untuk peningkatan pelayanan angkutan antarmoda di wilayah KSPN • Pemanfaatan teknologi digital dalam penyebaran informasi pelayanan angkutan KSPN • Melakukan pemantauan dan evaluasi per triwulan terhadap trayek dan subsidi angkutan antarmoda KSPN • Menambah jumlah layanan angkutan KSPN di daerah yang memiliki potensi wisata yang besar untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut • Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap operasional dan pelayanan angkutan KSPN agar pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) • Mengoptimalkan digitalisasi trayek angkutan KSPN sehingga semua trayek dapat terpancasi • Pengaturan koordinat terhadap parkir kapal, agar pelaksanaan angkutan antarmoda berjalan dengan baik dan tujuan penyelebaran angkutan antarmoda dapat tercapai • Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut • Melakukan survey usulan trayek baru keperintisan angkutan jalan sebelum penetapan jaringan trayek keperintisan • Melakukan Rapat Kerja Teknis dengan BPTD terkait pelaksanaan pemberian subsidi yang berupa bantuan biaya operasional angkutan jalan perintis sesuai dengan Keputusan Dirjen Hubdat No. 89/DIRJ/EB30 Tahun 2022, dan • Berkoordinasi dengan Badan Perencanaan, Setelidng Hubdat terkait pengawalan angkutan jalan perintis menggunakan GPS dan aplikasi MITRA DAMAI • Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut • Dit. Perairan TI • Menyusun regulasi untuk penyediaan dan pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda • Menentukan titik lokasi penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda sesuai skala prioritas yang mengacu pada kebijakan strategi nasional	• Dit. AI • Dit. PTT • Dit. TSDP
		RP 5 Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan	rasio	0,636	• Subsidi Perawatan Buy The Service • Fleet Management System operasional angkutan perkotaan dengan skema Buy The Service • Kegiatan Sewa Perangkat Tap on Bus dan Jasa Settlement beserta Rekonstruksi Duta Pembayaran Turf Layanan Buy The Service • Pendampingan Manajemen Proyek Pengembangan Angkutan Massal berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan	Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan	0,636	0,636	100%	Rp 535.934.071,000	100%	0,636	Rp 56.872.885,229	100,00%	10,61%	• Peningkatan jumlah Load Factor Tahun 2023 sebesar 38,74% menunjukkan jayanya BTS semakin meningkat dan cukup diminati oleh Masyarakat • Adanya Layanan program subsidi Buy The Service dapat meningkatkan Pendapatan Negara Bulan Pajak (PNBP) • Adanya Layanan program subsidi Buy The Service dapat meningkatkan pendapatan/meningkatkan masyarakat dari kendaraan pribadi ke angkutan umum • Layanan Angkutan umum yang nyaman sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam melakukan mobilitas atau pergerakan sehari - hari • Adanya Pengembalian program layanan buy the service ke pemerintah daerah sehingga dapat memulihkan program BTS ke daerah lain yang memerlukan • Pelaksanaan konsultasi untuk membahas rencana pengembangan angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan di suatu wilayah • Melakukan review terhadap regulasi terkait pelaksanaan program pengembangan angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan dengan skema buy the service • Mengajukan usulan tarif layanan BTS sesuai kebijakan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang jenis dan tarif PNBP yang bersifat wajib • Perencanaan yang komprehensif dalam membuat lokasi yang akan dipilih untuk penerapan program buy the service dengan memperhatikan RPJMN dan Rencana • Komitmen antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam program pengembangan dan peningkatan pelayanan angkutan perkotaan • Sosialisasi penyelenggaraan Program Buy the Service kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat • Melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan program buy the service secara reguler • Pengembangan dan peningkatan sistem IT pada layanan Buy The Service • Memanfaatkan alternatif pembiayaan dari sumber pendanaan lain untuk pengembangan program buy the service	Di. AI	
2	SP2 Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perhubungan	RP 2 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat	Nilai	94,057	Pembinaan dan Evaluasi Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Ditjen Hubdat	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat	94,057	94,057	100%	Rp 133.773,000	100%	95,143	Rp -	101,15%	0,00%	• Masih didapat pengguna jasa yang belum seluruhnya mendapatkan kualitas layanan yang baik • Masih banyak didapat pengguna jasa yang belum memiliki handphone/gadget • Masih belum maksimalnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Survey Kepuasan Masyarakat • Melakukan sosialisasi kepada perusahaan angkutan jalan terkait standar pelayanan minimal angkutan jalan • Memberikan apresiasi kepada perusahaan angkutan jalan yang telah memberikan pelayanan angkutan terbaik kepada masyarakat melalui kegiatan pemilihan PD terbaik • Mengadakan Bimbingan Teknis Aplikasi SA-SM-PM kepada seluruh penyedia pelayanan SSM • Mengadakan pendampingan pelaksanaan SSM secara bertahap • Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan SSM • Tidak lanjut atau hasil evaluasi • Menyediakan Fasilitas yang memadai untuk pengguna jasa yang tidak ada gadget untuk melakukan SSM • Melakukan perbaikan pelayanan dengan melakukan perbaikan pada aplikasi AIR SDP sehingga lebih memudahkan pengguna jasa untuk memproses pengajuan pelayanan • Melakukan perbaikan komunikasi terhadap pengguna jasa dan melakukan sosialisasi secara masif terhadap pengguna layanan sehingga ke depan dapat terwujud sinergitas terhadap layanan perlintas Direktorat Transportasi SDP	Di. TSDP	
		RP 6 On Time Performance (OTP) Transportasi SDP	%	83,513	• Pengawasan Pelaksanaan dan Pemantauan kegiatan Insidendi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi • Persewaan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Baru	On Time Performance (OTP) Transportasi SDP	83,513	83,513	100%	Rp 275.000,000	100%	83,533	Rp 84.323.716	100,00%	30,66%	• Pelaksanaan online tracking angkutan penyeberangan baru diterapkan pada Pelabuhan Penyeberangan Merak, Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Pelabuhan Penyeberangan Ketapang dan Pelabuhan Penyeberangan Gilimanau tetapi belum diterapkan pada perubahan penyeberangan lain yang terdapat pada PA 19 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tiket Angkutan Penyeberangan Secara Elektronik • Pada beberapa lintas terdapat gangguan surat alur pelayaran sehingga membutuhkan waktu lebih ketika akan sandar • Pada beberapa lintas kekurangan fasilitas dermaga sementara jumlah kapal yang banyak, sehingga harus menunggu giliran untuk sandar dan melakukan bongkar muat • Adanya keterlambatan pelayanan yang disebabkan oleh kapal yang gagal sandar karena kondisi tektis atau cuaca • Melakukan kegiatan Sosialisasi/Bimbingan Teknis SPM Angkutan Penyeberangan • Pelaksanaan online tracking angkutan penyeberangan baru diterapkan pada Pelabuhan Penyeberangan Merak, Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Pelabuhan Penyeberangan Ketapang dan Pelabuhan Penyeberangan Gilimanau tetapi belum diterapkan pada perubahan penyeberangan lain yang terdapat pada PA 19 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tiket Angkutan Penyeberangan Secara Elektronik • Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan dan ketepatan jadwal di lapangan • Melakukan pengawasan secara periodik terhadap ketepatan jadwal di lapangan • Melakukan evaluasi atas pelaksanaan pola operasi dan ketepatan jadwal • Dukungan sistem Digitalisasi Pengawasan Operasional untuk pengawasan operasional di lapangan	Di. TSDP	
		RP 7 On Time Performance (OTP) Transportasi Perkotaan	%	33,655	• Subsidi Perawatan Buy The Service • Fleet Management System operasional angkutan perkotaan dengan skema Buy The Service • Kegiatan Sewa Perangkat Tap on Bus dan Jasa Settlement beserta Rekonstruksi Duta Pembayaran Turf Layanan Buy The Service • Pendampingan Manajemen Proyek Pengembangan Angkutan Massal berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan	On Time Performance (OTP) Transportasi Perkotaan	33,655	33,655	100%	Rp 535.934.071,000	100%	49,086	Rp 56.872.885,229	145,85%	10,61%	• Adanya migrasi teknologi dari Teran Bus ke Mitra Darat memerlukan waktu penyesuaian komponen teknologi yang ada • Belum terdapatnya antara layanan angkutan umum perkotaan Buy The Service sebagai Turan Line Trayek Utama dengan Angkutan Pengempaan (Freder) seperti angkutan dan belum maksimalnya dukungan dari Feeder sehingga dapat mempengaruhi waktu tempuh layanan BTS • Dinamika masyarakat di lapangan yang sering terbalik sehingga sering dilakukan pengalihan rute sementara • Pemanfaatan teknologi ITS Bus Priority untuk memberikan prioritas bagi angkutan umum • Berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan perkotaan dan ketepatan jadwal di lapangan, memastikan pelaksanaan manajemen dan layanan lalu lintas seperti pembatasan kecepatan bagi kendaraan pribadi di suatu ruas jalan tertentu • Melakukan evaluasi secara periodik terhadap realitas On Time performance • Melakukan rapat evaluasi efektifitas pengaturan manajemen dan rekayasa lalu lintas dan hal terkait lainnya	Di. AI	

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	TARGET BULAN 1		REALISASI BULAN 1		% CAPAIAN BULAN 1		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENGANGGUP JAWAB				
								TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN							
								volume	%	Volume	%	%	%							
3	SFS Meningkatkan Keselamatan Transportasi	RP Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi jalan per 10.000 keberangkatan	rasio	0,008	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan Teknis Manajemen Batas Kecepatan Pembinaan Teknis Perusahaan APM dan Importir Kendaraan Bermotor Pembinaan Teknis Pengoperan Pemeriksa BAF Rancangan Bangun Kendaraan Bermotor Pembinaan Teknis Perusahaan Koneksi Kendaraan Bermotor Inspeksi Keselamatan Kapal Sarana Angkutan Lintasan Nalud dan Tahun Baru (Rampcheck) Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi Angkutan Orang Bimbingan Teknis Manajemen Kampanye Keselamatan Transportasi Jalan Pembinaan Teknis Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Monitoring Pembinaan Keselamatan Angkutan Umum (Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan) Program Asli Keselamatan Berkendara Bimbingan Teknis Keselamatan Jalan Anak Usia Sekolah Monitoring dan Evaluasi Keselamatan Transportasi Jalan Pembinaan Teknis Penilai Dokumen SMK PAU (Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Promosi dan Kampanye Keselamatan Forum LLAJ Bidang Keselamatan Jalan Harmonisasi RUNE 	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi jalan per 10.000 keberangkatan	0,008	0,008	100%	Rp	6.200.000,000	100%	0	Rp	805.736.774	200,00%	13,00%	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan angkutan umum yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) masih sangat sedikit, sampai Desember tahun 2023 sebanyak 127 perusahaan yang memiliki sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan dari kurang lebih 31.65 Perusahaan Angkutan Umum (PAU), hal tersebut dikarenakan belum diterapkannya sanksi bagi perusahaan angkutan yang belum menerapkan sehingga kesadaran akan hal tersebut masih sangat rendah dan dianggap tidak penting; Belum diterapkannya sanksi bagi perusahaan angkutan yang belum menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) Perusahaan Angkutan Umum; Belum satu tujuannya perusahaan angkutan umum dengan pemerintah akan pentingnya keselamatan, keefektifan merupakan investasi sedangkan perusahaan masih beranggapan bahwa keselamatan merupakan sebuah art cost bagi perusahaan itu sendiri; Kurangnya kesadaran Perusahaan Angkutan Umum akan pentingnya Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan mengurangi angka kecelakaan dan fatalitas. 	<ul style="list-style-type: none"> Akan disempurnakan peraturan terkait Sistem Manajemen Keselamatan pada perusahaan angkutan umum (SMK) terkait dengan pembagian wewenang antara pusat dan daerah dalam hal pembinaan keselamatan angkutan umum; Akan diatur regulasi terkait dengan penyediaan fasilitas tempat istirahat pengemudi angkutan umum; Akan diberikan reward kepada perusahaan angkutan umum yang sudah menerapkan SMK dan akan mendorong kepada perusahaan angkutan umum untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan pada perusahaannya dengan melakukan sistem atau pendampingan dalam penerapan SMK; Melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang keselamatan secara menyeluruh baik offline maupun online (melalui media elektronik, media sosial dll); Mengembangkan public figure untuk mengkampanyekan keselamatan jalan sehingga meningkatkan awareness masyarakat terhadap keselamatan jalan; Melakukan Pelatihan Kompetensi Inspektur dan Auditor Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum, dengan mengikutsertakan 33 (tiga puluh tiga) Balai Pengelola Transportasi Darat; Melaksanakan Pembekalan dan pendampingan Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan terhadap Perusahaan Angkutan Umum, baik AAAP/Perwilata maupun Angkutan Barang Khusus (BK); Melaksanakan Bimbingan Teknis Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum, dengan mengikutsertakan 33 (tiga puluh tiga) Balai Pengelola Transportasi Darat; Melaksanakan Program Ases Peningkatan Kualitas Mental dan disiplin Pengemudi Angkutan umum; Melaksanakan Training Of Trainer (TOT) Sistem Manajemen Angkutan Umum Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU) dalam rangka meningkatkan Kompetensi SDM Penilai SMK PAU; Melaksanakan Ramp Check Angkutan Umum; Monitoring dan Evaluasi Keselamatan Transportasi Jalan; Melakukan Monitoring Pembinaan Angkutan Umum AAAP/Perwilata maupun Angkutan Barang (BK); Utuk mengoptimasi pendants dan pengetahuan penerapan SMK pada perusahaan angkutan umum akan dibagikan sistem informasi SMK pada perusahaan angkutan umum (SIPOKAM) 	Dr. Sarana Tj
		RP Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran	rasio	0,033	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penegakan Hukum Bidang TSPD Monitoring dan Pemantauan Kecelakaan Kapal Sungai Danau dan Penyeberangan 	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran	0,033	0,033	100%	Rp	950.000,000	100%	0	Rp	27.350.000	200,00%	2,88%	<ul style="list-style-type: none"> Sumbu Daya Manusia yang berkompetensi mengalami peningkatan pada tahun 2024 seperti penambahan monev inspektor sungai danau dan penyeberangan, penambahan ahli ukur kapal, penambahan auditor keselamatan kapal, penambahan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang LUKD, dll; Adanya bimbingan teknis dan sosialisasi di bidang keselamatan sungai, danau dan penyeberangan kepada 33 Balai Pengelola Transportasi Darat dan SDPP Danau Tobo; Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Inspeksi keselamatan Transportasi Penyeberangan (Rampcheck) dan Monitoring secara berkala terhadap kelainan sarana, prasarana dan Operasional Penyeberangan; Regulasi di bidang keselamatan TSPD yang sudah mengatani peningkatan pematian 	<ul style="list-style-type: none"> Segera Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh syahbandar dan petugas kehendak-hendak pada instansi yang mengelola keamanan cuaca dan pengingat-memantau terhadap peraturan SPB; Menyediakan monitor cuaca untuk pemantauan data real time cuaca pada lintas penyeberangan; Berkordinasi dengan BMKG terkait prakiraan cuaca; Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi inspeksi keselamatan Transportasi Penyeberangan (Ramp Check) dan Monitoring secara berkala terhadap kelainan sarana, prasarana dan Operasional Penyeberangan; Mengadakan Bimbingan Teknis di bidang keselamatan angkutan penyeberangan kepada 33 (Tiga Puluh Tiga) Balai Pengelola Transportasi Darat dan 1 (Satu) Kantor kesyahbandaran dan Ortortas Pelabuhan Penyeberangan (OSPP) Danau Tobo; Melakukan pengendalian kapal patroli untuk pengawasan di lokasi daerah yang rawan kecelakaan dan meningkatkan kondisi pantaian terhadap cuaca ekstrem; Mengadakan sosialisasi keselamatan angkutan penyeberangan kepada para operator Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan serta 33 (Tiga Puluh Tiga) Balai Pengelola Transportasi Darat dan 1 (Satu) Kantor kesyahbandaran dan Ortortas Pelabuhan Penyeberangan (OSPP) Danau Tobo; Pembinaan Barisan Teknis Pengawasan keselamatan angkutan penyeberangan di 33 (Tiga Puluh Tiga) Balai Pengelola Transportasi Darat dan 1 (Satu) Kantor kesyahbandaran dan Ortortas Pelabuhan Penyeberangan (OSPP) Danau Tobo; Penyusunan aturan Manajemen keselamatan kapal, patroli dan pemantauan; Penyusunan Kebijakan terkait kompetensi kesyahbandaran dan database kinerja pengawasan operasional SDP; Melakukan koordinasi dan tata kelola bidang kesyahbandaran; Melakukan Pengawasan lintas berylar; Melakukan Kompetensi SDM dibidang transportasi SDP dengan Pemberian Diklat Kompetensi seperti Diklat Syahbandar, diklat Syahbandar Pembantu, Diklat Marine inspector, yang bekerjasama dengan Diklat Pembinaan SDM yang terkait seperti SP2T dan Pelaksanaan SOP; Melakukan Monitoring Pelaksanaan Tusi Keselamatan dan Kampanye Pelayaran TSPD di Seluruh Indonesia Melalui Zoom dengan 33 (Tiga Puluh Tiga) Balai Pengelola Transportasi Darat dan 1 (Satu) Kantor kesyahbandaran dan Ortortas Pelabuhan Penyeberangan (OSPP) Danau Tobo; Pemberian Webinar terkait tata cara pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran TSPD dan Webinar terkait tata cara pemberian Surat Perijinan Berylar (SPB) kepada 33 (Tiga Puluh Tiga) Balai Pengelola Transportasi Darat dan 1 (Satu) Kantor kesyahbandaran dan Ortortas Pelabuhan Penyeberangan (OSPP) Danau Tobo; Membuat timeline target penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga proses penyusunan berjalan sesuai waktu yang ditentukan; Membantu proses pengharmonisan yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang dibantu oleh Kementerian/Lembaga/Ditakerbakti terkait sehingga peraturan yang dibuatkan dapat segera ditetapkan dan diundangkan; Jikalau peraturan sudah diundangkan maka diharapkan segera mendapatkan tanggapan/cas action dari masyarakat. 	Dr. TSPD
4	SP4 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum	RP Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat Class Action oleh Masyarakat Dibandingkan Dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Diwawakan/Ditertapkan	%	0,000	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Workshop Peraturan Perundang-undangan Pelaksanaan Advokasi dan Pertimbangan Hukum Bidang Perhubungan Darat 	Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat Class Action oleh Masyarakat Dibandingkan Dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Diwawakan/Ditertapkan	0,000	0,000	100%	Rp	4.151.324,000	100%	0,000	Rp	977.871,805	200,00%	23,56%	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan evaluasi terhadap peraturan yang telah baru ditetapkan Melakukan evaluasi terhadap sosialisasi dan uji publik yang telah dilakukan. Melakukan sosialisasi terhadap operator langsung terkait peraturan yang baru ditetapkan 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan komitmen Pimpinan Tinggi untuk lebih mendorong pelaksanaan Reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat; Melakukan internalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang lebih menyeluruh pada seluruh unit kerja dan pegawai di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat; Melakukan pendampingan kepada seluruh unit kerja langsung terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di unit kerjanya; Melakukan Pengawasan dan Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Hubudat; Melaksanakan tindak lanjut perbaikan atas hasil Pengawasan dan Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Hubudat 	Bagian Hukum dan Hukum, Setdjen Hubudat
5	SP5 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	RP Indeks RB Kementerian Perhubungan	Nilai	80,500	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Budaya Birokrasi BERAKHLAK dengan ASN yang Profesional di Lingkungan Ditjen Hubudat Penyusunan, Revisi dan Evaluasi Papis Bisnis dan Penerapan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Ditjen Hubudat Revisi dan Evaluasi SOP di Lingkungan Ditjen Hubudat Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Ditjen Hubudat Monitoring dan Evaluasi Pembangunan 2i di Lingkungan Ditjen Hubudat Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Ditjen Hubudat Pembinaan dan Evaluasi Dengar Keluhan di Lingkungan Ditjen Hubudat Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Standar Pelayanan serta Kualitas Pelayanan Publik Evaluasi Kelembagaan di Lingkungan Ditjen Hubudat Pembinaan dan Evaluasi Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Ditjen Hubudat 	Indeks RB Kementerian Perhubungan	80,500	80,500	100%	Rp	883.215,000	100%	77,450	Rp	-	96,21%	0,00%	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan reformasi birokrasi pada tingkat E dan 1 sudah berjalan sesuai arahan Leading Sector, namun belum terinternalisasi secara menyeluruh hingga ke tingkat kerja dibawahan; Monitoring dan evaluasi rencana kerja pelaksanaan reformasi birokrasi di level unit kerja belum seluruhnya dilakukan; Seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/inkonferensi dan dipetakan dengan baik namun hasil identifikasi analisis tersebut belum sepenuhnya dibenarkan/ditanggapi sehingga belum dapat dipastikan kebijakan yang dibuat oleh Ditjen Perhubungan Darat harmonis dengan kebijakan lain; Belum optimalnya evaluasi terhadap kesesuaian organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan dan mendarat kepada unit kerja; Pengaturan sistem manajemen SDM belum sepenuhnya optimal, hal ini disebabkan antara lain belum dilakukannya pemetaan talenta sebagai dasar penempatan jabatan kritik/suasi serta penyusunan perencanaan pengembangan kompetensi pegawai atau Human Capital Development Plan (HCDP) yang belum dilakukan secara menyeluruh serta pola rotasi dan mutasi yang dilakukan secara massal belum didasarkan pemetaan kompetensi yang jelas; Monitoring dan evaluasi implementasi penguatan kebijakan pengawasan internal dan integritas masih belum mengurug tingkat efektifitas penguatan praktik, penerapan SOP, pengalihan pengalihan masyarakat, White Blowing System dan kebijakan benturan kepentingan Implementasi pelayanan publik belum sepenuhnya optimal, hal ini ditunjukkan dengan masih sedikitnya unit kerja yang telah menandatangani hasil survei kepuasan masyarakat dan menerapkan kebijakan pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar. 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan komitmen Pimpinan Tinggi untuk lebih mendorong pelaksanaan Reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat; Melakukan internalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang lebih menyeluruh pada seluruh unit kerja dan pegawai di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat; Melakukan pendampingan kepada seluruh unit kerja langsung terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di unit kerjanya; Melakukan Pengawasan dan Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Hubudat; Melaksanakan tindak lanjut perbaikan atas hasil Pengawasan dan Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Hubudat 	Bagian SDM dan Umum, Setdjen Hubudat



MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERUBAHAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT JENDERAL PERUBAHAN DARAT

REJAN FEBRUARI

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN		KEGIYATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	TARGET BULAN-2		REALISASI BULAN-2		% CAPAIAN BULAN-2		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB		
			(A)	(B)				TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA %	CAPAIAN ANGGARAN %					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
1	SP1 Meningkatkan Konektivitas Transportasi Nasional	RP 1 Basis Konektivitas Transportasi Darat	rasio	0,946	JALAN • Subsidir Angkutan Antarmoda untuk mendukung KSPN • Monitoring Angkutan Antarmoda untuk mendukung KSPN • Subsidir Angkutan Jalan Perintis • Trayek ADAP yang dilayani • Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keperintihan Angkutan Jalan • Survey Usulan Trayek Baru Keperintihan Angkutan Jalan • Subsidir Perawatan Buy The Service • Terminal Tipe A (Pembangunan + Operasional) Pusat + Balai • Terminal Barang (Pembangunan + Operasional) • Fasilitas (Pusat + Balai) SUNGAI, DANAU & PENYEBERANGAN • Pelembagaan (Pembangunan Baru, Lanjutan dan Rehabilitasi) • Subsidir Angkutan Penyeberangan Perintis • Rehabilitasi Kapal Penyeberangan Nis Bolong • Subsidir Re-ka Long Distance Ferry Patimban - Banjarmasin dan Patimban - Pontianak	Rasio Konektivitas Transportasi Darat	0,946	0,946	100%	Rp 2.654.181.480,102	100%	0,957	Rp 250.377.614,018	101,65%	9,43%	<ul style="list-style-type: none"> • Dit. Angkutan Jalan • Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap trayek dan subsidi angkutan perintis, trayek angkutan AKAP dan trayek angkutan ALBN • Pengembangan trayek ALBN terhadap pada perjanjian kerjasama antar dua negara • Kondisi infrastruktur jalan di Indonesia masih tertinggal dengan negara yang berbatasan dengan Indonesia • Jumlah operator yang mau melayani pada trayek ALBN masih terbatas • Pelayanan trayek keperintihan angkutan jalan saat ini berdasarkan usulan dari Pemerintah Daerah dimana lokasi yang diusulkan adalah daerah yang belum terlayani oleh angkutan umum kota, namun belum mengkonstruksi daerah IT (Terdapan, Terlayani, Tertinggal) • Pelayanan keperintihan angkutan jalan belum dapat dilaksanakan secara maksimal dikarenakan kondisi geografis (seperti pegunungan atau dataran tinggi) dan akses jalan yang belum memadai • Kendaraan operasional angkutan jalan perintis sebagian besar sudah mencapai umur teknis sehingga perlu diremajakan dan kendaraan yang digunakan tidak sesuai dengan akses jalan yang dilalui • Terbatasnya aksesibilitas dan konektivitas antarmoda transportasi di beberapa wilayah KSPN, yang dapat menghambat aksesibilitas wisatawan menuju ke destinasi angkutan antarmoda KSPN atau destinasi wisata lainnya di daerah tersebut • Adanya resistensi dari angkutan umum yang diawasi angkutan antarmoda • Kurangnya sosialisasi dan promosi terhadap keberadaan angkutan antarmoda • Tingginya harga tiket pesawat domestik menyebabkan berkurangnya kedatangan wisatawan domestik dari luar provinsi • Kurangnya event yang diadakan di destinasi wisata tujuan layanan angkutan KSPN • Kurangnya pengawasan dan kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh operator • Dit. Perairan TI • Masih adanya pembangunan dan revitalisasi Terminal Pemungpas Tipe A yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Dit. Angkutan Jalan • Mulai tahun anggaran 2022, anggaran pembangunan angkutan antarmoda KSPN menjadi besaran BPTD di wilayah KSPN terkait, hal ini untuk peningkatan pelayanan angkutan antarmoda di wilayah KSPN • Pemanfaatan teknologi digital dalam penyebaran informasi pelayanan angkutan KSPN • Melakukan pemantauan dan evaluasi per triwulan terhadap trayek dan pembangunan angkutan antarmoda KSPN • Menambah jumlah layanan angkutan KSPN di daerah yang memiliki potensi wisata yang besar untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut • Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap operasional dan pelayanan angkutan KSPN agar pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) • Mengoptimalkan digitalisasi trayek angkutan KSPN sehingga semua trayek dapat terpantau • Penguatan koordinasi terhadap pihak terkait, agar pelaksanaan angkutan antarmoda berjalan dengan baik dan tujuan penyelenggaraan angkutan antarmoda dapat tercapai • Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut • Melakukan survey usulan trayek baru keperintihan angkutan jalan sebelum penetapan jaringan trayek keperintihan • Melakukan Rapat Kerja Teknis dengan BPTD terkait pelaksanaan pemberian subsidi yang berupa bantuan biaya operasional angkutan jalan perintis sesuai dengan Keputusan Dirjen Hubdat No. 89/KB/EB/30 Tahun 2022, dan • Berkolaborasi dengan Badan Perencanaan, Setelidng Hubdat terkait pengawalan angkutan jalan perintis menggunakan GPS dan aplikasi MITRA DAMAI • Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut 	<ul style="list-style-type: none"> • Dit. AI • Dit. PTT • Dit. TSDP
		RP 5 Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan	rasio	0,636	• Subsidir Perawatan Buy The Service • Fleet Management System operasional angkutan perkotaan dengan skema Buy The Service • Kegiatan Sewa Perangkat Tap on Bus dan Jasa Settlement beserta Rekonstruksi Duta Pembayaran Turf Layanan Buy The Service • Pendampingan Manajemen Proyek Pengembangan Angkutan Massal berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan	Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan	0,636	0,636	100%	Rp 535.934.071,000	100%	0,636	Rp 56.872.885,229	100,00%	10,61%	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan jumlah Load Factor Tahun 2023 sebesar 38,74% menunjukkan jayanya BTS semakin meningkat dan cukup diminati oleh Masyarakat • Adanya Layanan program subsidi Buy The Service dapat meningkatkan Pendapatan Negara Bulan Pajak (PNBP) • Adanya Layanan program subsidi Buy The Service dapat meningkatkan pendapatan/meningkatkan masyarakat dari kendaraan pribadi ke angkutan umum • Layanan Angkutan umum yang nyaman sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam melakukan mobilitas atau pergerakan sehari - hari • Adanya Pengembalian program layanan buy the service ke pemerintah daerah sehingga dapat memulihkan program BTS ke daerah lain yang memerlukan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kondisi yang membahas rencana pengembangan angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan di suatu wilayah • Melakukan review terhadap regulasi terkait pelaksanaan program pengembangan angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan dengan skema buy the service • Mengajukan usulan tarif layanan BTS masa keabadian Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang jenis dan tarif PNBP yang bersifat wajib • Perencanaan yang komprehensif dalam membentuk lokasi yang akan diujikan untuk penerapan program buy the service dengan memperhatikan RPJMN dan Rencana • Komitmen antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam program pengembangan dan peningkatan pelayanan angkutan perkotaan • Sosialisasi penyelenggaraan Program Buy the Service kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat • Melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan program buy the service secara reguler • Pengembangan dan peningkatan sistem IT pada layanan Buy The Service • Memanfaatkan alternatif pembiayaan dari sumber pendanaan lain untuk pengembangan program buy the service 	<ul style="list-style-type: none"> • Dit. AI
2	SP2 Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perhubungan	RP 2 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat	Nilai	94,057	Pembinaan dan Evaluasi Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Ditjen Hubdat	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat	94,057	94,057	100%	Rp 133.773,000	100%	95,143	Rp -	101,15%	0,00%	<ul style="list-style-type: none"> • Masih didapati pengguna jasa yang belum seluruhnya mendapatkan kualitas layanan yang baik • Masih banyak didapati pengguna jasa yang belum memiliki handphone/gadget • Masih belum maksimalnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Survey Kepuasan Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan sosialisasi kepada perusahaan angkutan jalan terkait standar pelayanan minimal angkutan jalan • Memberikan apresiasi kepada perusahaan angkutan jalan yang telah memberikan pelayanan angkutan terbaik kepada masyarakat melalui kegiatan pemilihan PD terbaik • Mengadakan Bimbingan Teknis Aplikasi SIM-PM kepada seluruh penyedia pelayanan SIM • Mengadakan pendampingan pelaksanaan SIM secara bertahap • Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan SIM • Tidak layak atau tidak memadai • Menyediakan Fasilitas yang memadai untuk pengguna jasa yang tidak ada gadget untuk melakukan SIM • Melakukan perbaikan pelayanan dengan melakukan perbaikan pada aplikasi AIR SDP sehingga lebih memudahkan pengguna jasa untuk memproses pengajuan pelayanan • Melakukan perbaikan komunikasi terhadap pengguna jasa dan melakukan sosialisasi secara masif terhadap pengguna layanan sehingga ke depan dapat terwujud sinergitas terhadap layanan perlintas Direktorat Transportasi SDP 	
		RP 6 On Time Performance (OTP) Transportasi SDP	%	83,513	• Pengawasan Pelaksanaan dan Pemantauan kegiatan Insidendi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi • Persewaan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Baru	On Time Performance (OTP) Transportasi SDP	83,513	83,513	100%	Rp 275.000,000	100%	83,533	Rp 84.323.716	100,00%	30,66%	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan online ticketing angkutan penyeberangan baru diterapkan pada Pelabuhan Penyeberangan Merak, Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Pelabuhan Penyeberangan Ketapang dan Pelabuhan Penyeberangan Gilimanau tetapi belum diterapkan pada perubahan penyeberangan lain yang terdapat pada PA 19 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tiket Angkutan Penyeberangan Secara Elektronik • Pada beberapa lintas terkendala gangguan surat alur pelayaran sehingga membutuhkan waktu lebih ketika akan sandar • Pada beberapa lintas terkendala fasilitas dermaga sementara jumlah kapal yang banyak, sehingga harus menunggu giliran untuk sandar dan melakukan bongkar muat • Adanya keterlambatan pelayanan yang disebabkan oleh kapal yang gagal sandar karena kondisi teknis atau cuaca 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kegiatan Sosialisasi/Bimbingan Teknis SPM Angkutan Penyeberangan • Pelaksanaan online ticketing angkutan penyeberangan baru diterapkan pada Pelabuhan Penyeberangan Merak, Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Pelabuhan Penyeberangan Ketapang dan Pelabuhan Penyeberangan Gilimanau tetapi belum diterapkan pada perubahan penyeberangan lain yang terdapat pada PA 19 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tiket Angkutan Penyeberangan Secara Elektronik • Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan dan ketepatan jadwal di lapangan • Melakukan pengawasan secara periodik terhadap ketepatan jadwal di lapangan • Melakukan evaluasi atas pelaksanaan pola operasi dan ketepatan jadwal • Dukungan sistem Digitalisasi Pengawasan Operasional untuk pengawasan operasional di lapangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dit. TSDP
		RP 7 On Time Performance (OTP) Transportasi Perkotaan	%	33,655	• Subsidir Perawatan Buy The Service • Fleet Management System operasional angkutan perkotaan dengan skema Buy The Service • Kegiatan Sewa Perangkat Tap on Bus dan Jasa Settlement beserta Rekonstruksi Duta Pembayaran Turf Layanan Buy The Service • Pendampingan Manajemen Proyek Pengembangan Angkutan Massal berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan	On Time Performance (OTP) Transportasi Perkotaan	33,655	33,655	100%	Rp 535.934.071,000	100%	49,086	Rp 56.872.885,229	145,85%	10,61%	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya migrasi teknologi dari Teman Bus ke Mitra Darat memerlukan waktu penyesuaian komponen teknologi yang ada • Belum terdapatnya antara layanan angkutan umum perkotaan Buy The Service sebagai Turuk Line Trayek Utama dengan Angkutan Pengempaan (Freder) seperti angkutan dan belum maksimalnya dukungan dari Feeder sehingga dapat mempengaruhi waktu tempuh layanan BTS • Dinamika masyarakat di lapangan yang sering terdapat sehingga sering dilakukan pengalihan rute sementara 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan teknologi ITS Bus Priority untuk memberikan prioritas bagi angkutan umum • Berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait agar pelaksanaan dan penerapan puih strategi khususnya pada kawasan yang dilayani oleh BTS agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan perkotaan dan ketepatan jadwal di lapangan, misalnya dengan pelaksanaan manajemen dan layanan lalu lintas seperti pembatasan kecepatan bagi kendaraan pribadi di suatu ruas jalan tertentu • Melakukan evaluasi secara periodik terhadap realitas On Time performance • Melakukan rapat evaluasi efektifitas pengaturan manajemen dan rekayasa lalu lintas dan hal terkait lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Dit. AI

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	TARGET BULAN 2		REALISASI BULAN 2		% CAPAIAN BULAN 2		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENGANGGUP JAWAB				
								TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN							
								volume	%	Volume	%	%	%							
3	SFS Meningkatkan Keselamatan Transportasi	RP 3 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi jalan per 10.000 keberangkatan	rasio	0,008	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan Teknis Manajemen Batas Kecepatan Pembinaan Teknis Perusahaan APM dan Importir Kendaraan Bermotor Pembinaan Teknis Pengoperasian BAF Rancangan Bangunan Kendaraan Bermotor Pembinaan Teknis Perusahaan Kargo/ Kendaraan Bermotor Inspeksi Keselamatan Kapal Sarana Angkutan Lembangan Nalud dan Tahun Baru (Rampcheck) Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi Angkutan Orang Bimbingan Teknis Manajemen Kampanye Keselamatan Transportasi Jalan Pembinaan Teknis Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Monitoring Pembinaan Keselamatan Angkutan Umum (Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan) Program Aksi Keselamatan Berkendara Bimbingan Teknis Keselamatan Jalan Anak Usia Sekolah Monitoring dan Evaluasi Keselamatan Transportasi Jalan Pembinaan Teknis Penilai Dokumen SMK PAU (Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Promosi dan Kampanye Keselamatan Forum LLAJ Bidang Keselamatan Jalan Harmonisasi RUNE 	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi jalan per 10.000 keberangkatan	0,008	0,008	100%	Rp	6.200.000,000	100%	0	Rp	805.736.774	200,00%	13,00%	<ul style="list-style-type: none"> Persiapan angkutan umum yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) masih sangat sedikit, sampai Desember tahun 2023 sebanyak 127 perusahaan yang memiliki sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan dari kurang lebih 31.65 Perusahaan Angkutan Umum (PAU), hal tersebut dikarenakan belum diterapkannya sanksi bagi perusahaan angkutan yang belum menerapkan sehingga kesadaran akan hal tersebut masih sangat rendah dan dianggap tidak penting; Belum diterapkannya sanksi bagi perusahaan angkutan yang belum menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) Perusahaan Angkutan Umum; Belum satu tujuannya perusahaan angkutan umum dengan pemerintah akan pentingnya keselamatan, keefektifan merupakan investasi sedangkan perusahaan masih beranggapan bahwa keselamatan merupakan sebuah art cost bagi perusahaan itu sendiri; Kurangnya kesadaran Perusahaan Angkutan Umum akan pentingnya Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan mengurangi angka kecelakaan dan fatalitas. 	<ul style="list-style-type: none"> Akan disempurnakan peraturan terkait Sistem Manajemen Keselamatan pada perusahaan angkutan umum (SMK) terkait dengan pembagian wewenang antara pusat dan daerah dalam hal pembinaan keselamatan angkutan umum; Akan diatur regulasi terkait dengan penyediaan fasilitas tempat istirahat pengemudi angkutan umum; Akan diberikan reward kepada perusahaan angkutan umum yang sudah menerapkan SMK dan akan mendorong kepada perusahaan angkutan umum untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan pada perusahaannya dengan melakukan sistem atau pendampingan dalam penerapan SMK; Melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang keselamatan secara menyeluruh baik offline maupun online (melalui media elektronik, media sosial dll); Mengembangkan public figure untuk mengkampanyekan keselamatan jalan sehingga meningkatkan awareness masyarakat terhadap keselamatan jalan; Melakukan Pelatihan Kompetensi Inspektur dan Auditor Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum, dengan mengikutsertakan 33 (tiga puluh tiga) Balai Pengelola Transportasi Darat; Melaksanakan Pembekalan dan pendampingan Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan terhadap Perusahaan Angkutan Umum, baik AAAP/Perwilata maupun Angkutan Barang Khusus (BK); Melaksanakan Bimbingan Teknis Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum, dengan mengikutsertakan 33 (tiga puluh tiga) Balai Pengelola Transportasi Darat; Melaksanakan Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental dan disiplin Pengemudi Angkutan umum; Melaksanakan Training Of Trainer (TOT) Sistem Manajemen Angkutan Umum Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU) dalam rangka meningkatkan Kompetensi SDM Penilai SMK PAU; Melaksanakan Ramp Check Angkutan Umum; Monitoring dan Evaluasi Keselamatan Transportasi Jalan; Melakukan Monitoring Pembinaan Angkutan Umum AAAP/Perwilata maupun Angkutan Barang (BK); Utukal mengemudikan kendaraan dan pengawasan penerapan SMK pada perusahaan angkutan umum akan dibagikan sidem informasi SMK pada perusahaan angkutan umum (SI-PONAM) 	Dr. Sarana Tj
						RP 2 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran	rasio	0,033	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penegakan Hukum Bidang TSPD Monitoring dan Pemantauan Kecelakaan Kapal Sungai Danau dan Penyeberangan 	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran	0,033	0,033	100%	Rp	950.000,000	100%	0	Rp	27.350.000	200,00%
4	SP4 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum	RP 1 Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat Class Action oleh Masyarakat Dibandingkan Dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dihukumi/Ditertigakan	%	0,000	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Workshop Peraturan Perundang-undangan Pelaksanaan Advokasi dan Pertimbangan Hukum Bidang Perhubungan Darat 	Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat Class Action oleh Masyarakat Dibandingkan Dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dihukumi/Ditertigakan	0,000	0,000	100%	Rp	4.151.324,000	100%	0,000	Rp	977.871,805	200,00%	23,56%	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan evaluasi terhadap peraturan yang telah baru ditetapkan Melakukan evaluasi terhadap sosialisasi dan uji publik yang telah dilakukan. Melakukan sosialisasi terhadap operator langsung terkait peraturan yang baru ditetapkan 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan komitmen Pimpinan Tinggi untuk lebih mendorong pelaksanaan Reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat; Melakukan internalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang lebih menyeluruh pada seluruh unit kerja dan pegawai di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat; Melakukan pendampingan kepada seluruh unit kerja langsung terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di unit kerjanya; Melakukan Pengawasan dan Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Hubdat; Melaksanakan tindak lanjut perbaikan atas hasil Pengawasan dan Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Hubdat 	Bagian Hukum dan Hukum, Setdjen Hubdat
5	SP5 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	RP 1 Indeks RB Kementerian Perhubungan	Nilai	80,500	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Budaya Birokrasi BERAKHLAK dengan ASN yang Profesional di Lingkungan Ditjen Hubdat Penyusunan, Revisi dan Evaluasi Papis Bisnis dan Penerapan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Ditjen Hubdat Revisi dan Evaluasi SOP di Lingkungan Ditjen Hubdat Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Ditjen Hubdat Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI di Lingkungan Ditjen Hubdat Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Ditjen Hubdat Pembinaan dan Evaluasi Dengar Keluhan Masyarakat di Lingkungan Ditjen Hubdat Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Standar Pelayanan serta Kualitas Pelayanan Publik Evaluasi Kelembagaan di Lingkungan Ditjen Hubdat Pembinaan dan Evaluasi Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Ditjen Hubdat 	Indeks RB Kementerian Perhubungan	80,500	80,500	100%	Rp	883.215,000	100%	77,450	Rp	-	96,21%	0,00%	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan reformasi birokrasi pada tingkat I dan II sudah berjalan sesuai arahan Leading Sector, namun belum terinternalisasi secara menyeluruh hingga ke tingkat kerja dibawahan; Monitoring dan evaluasi rencana kerja pelaksanaan reformasi birokrasi di level unit kerja belum seluruhnya dilakukan; Sebelum peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/inkonflik identifikasi dan dipetakan dengan baik namun hasil identifikasi analitis tersebut belum sepenuhnya dibenarkan/ ditanggapi sehingga belum dapat dipastikan kebijakan yang dibuat oleh Ditjen Perhubungan Darat harmonis dengan kebijakan lain; Belum optimalnya evaluasi terhadap kesesuaian organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan dan mendarat kepada unit kerja; Pengaturan sistem manajemen SDM belum sepenuhnya optimal, hal ini disebabkan antara lain belum dilakukannya pemetaan talenta sebagai dasar penempatan jabatan kritik/lokasi/serta penyusunan perencanaan pengembangan kompetensi pegawai atau Human Capital Development Plan (HCDP) yang belum dilakukan secara menyeluruh serta pola rotasi dan mutasi yang dilakukan secara massal belum didasarkan pemetaan kompetensi yang jelas; Monitoring dan evaluasi implementasi penguatan kebijakan pengawasan internal dan integritas masih belum mengukur tingkat efektifitas penguatan praktik, penerapan SOP, pengalihan pengalihan masyarakat, White Blowing System dan kebijakan benturan kepentingan Implementasi pelayanan publik belum sepenuhnya optimal, hal ini ditunjukkan dengan masih sedikitnya unit kerja yang telah menandatangani hasil survei kepuasan masyarakat dan menerapkan kebijakan pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar. 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan komitmen Pimpinan Tinggi untuk lebih mendorong pelaksanaan Reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat; Melakukan internalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang lebih menyeluruh pada seluruh unit kerja dan pegawai di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat; Melakukan pendampingan kepada seluruh unit kerja langsung terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di unit kerjanya; Melakukan Pengawasan dan Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Hubdat; Melaksanakan tindak lanjut perbaikan atas hasil Pengawasan dan Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Hubdat 	Bagian SDM dan Umum, Setdjen Hubdat



MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT JENDERAL PERUBAHAN DARAT

REVISI: MARET

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN		KEGIYATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	TARGET BULAN 3		REALISASI BULAN 3		% CAPAIAN BULAN 3		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB		
			(A1)	(A2)				TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA %	CAPAIAN ANGGARAN %					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
1	SP1 Meningkatkan Konektivitas Transportasi Nasional	RP 1 Basis Konektivitas Transportasi Darat	rasio	0,946	JALAN • Subsidi Angkutan Antarmoda untuk mendukung KSPN • Monitoring Angkutan Antarmoda untuk mendukung KSPN • Subsidi Angkutan Jalan Perintis • Trayek ADP yang dilayani • Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan • Survey Usulan Trayek Baru Keperintisan Angkutan Jalan • Subsidi Perawatan Bus The Service • Terminal Tipe A (Pembangunan + Operasional) Pusat + Balai • Terminal Barang (Pembangunan + Operasional) • Fasilitas (Pusat + Balai) SUNGAI, DANAU & PENYEBERANGAN • Pelembagaan (Pembangunan Baru, Lanjutan dan Rehabilitasi) • Subsidi Angkutan Penyeberangan Perintis • Rehabilitasi Kapal Penyeberangan Nis Boleng • Subsidi Re-ka Long Distance Ferry Patimban - Banjarmasin dan Patimban - Pontianak	Rasio Konektivitas Transportasi Darat	0,946	0,946	100%	Rp 2.654.181.480,102	100%	0,957	Rp 250.377.614,018	101,65%	9,43%	• Dit. Angkutan Jalan • Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap trayek dan subsidi angkutan perintis, trayek angkutan ADP dan trayek angkutan ALBN • Pengembangan trayek ALBN terpadung pada perjanjian kerjasama antar dua negara • Kondisi infrastruktur jalan di Indonesia masih tertinggal dengan negara yang berbatasan dengan Indonesia; • Jumlah operator yang masih melayani pada trayek ALBN masih terbatas; • Pelayanan trayek keperintisan angkutan jalan saat ini berdasarkan usulan dari Pemerintah Daerah dimana lokasi yang diusulkan adalah daerah yang belum terlayani oleh angkutan umum kota, namun belum mengkonstruksi daerah IT (Tipekan, Terlayani, Tertinggal) • Pelayanan keperintisan angkutan jalan belum dapat dilaksanakan secara maksimal dikarenakan kondisi geografis (seperti pegunungan atau dataran tinggi) dan akses jalan yang belum memadai; • Kendaraan operasional angkutan jalan perintis sebagian besar sudah mencapai umur teknis sehingga perlu diremajakan dan kendaraan yang digunakan tidak sesuai dengan akses jalan yang dilalui; • Terbatasnya aksesibilitas dan konektivitas antarmoda transportasi di beberapa wilayah KSPN, yang dapat menghambat aksesibilitas wisatawan menuju ke destinasi angkutan antarmoda KSPN atau destinasi wisata lainnya di daerah tersebut; • Adanya resistensi dari angkutan umum yang diwadi angkutan antarmoda; • Kurangnya sosialisasi dan promosi terhadap keberadaan angkutan antarmoda; • Tingginya harga tiket pesawat domestik menyebabkan berkurangnya kedatangan wisatawan domestik dari luar provinsi; • Kurangnya event yang diadakan di destinasi wisata tujuan layanan angkutan KSPN; • Kurangnya pengawasan dan kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh operator; • Dit. Perairan TI • Masih adanya pembangunan dan revitalisasi Terminal Pemungut Tipe A yang	• Dit. Angkutan Jalan • Mulai tahun anggaran 2022, anggaran pembangunan angkutan antarmoda KSPN menjadi besaran BPTD di wilayah KSPN terkait, hal ini untuk peningkatan pelayanan angkutan antarmoda di wilayah KSPN; • Pemanfaatan teknologi digital dalam penyebaran informasi pelayanan angkutan KSPN; • Melakukan pemantauan dan evaluasi per triwulan terhadap trayek dan subsidi angkutan antarmoda KSPN; • Menambah jumlah layanan angkutan KSPN di daerah yang memiliki potensi wisata yang besar untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut; • Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap operasional dan pelayanan angkutan KSPN agar pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM); • Mengoptimalkan digitalisasi trayek angkutan KSPN sehingga semua trayek dapat terpancasi; • Penguatan koordinasi terhadap pihak terkait, agar pelaksanaan angkutan antarmoda berjalan dengan baik dan tujuan penyelenggaraan angkutan antarmoda dapat tercapai; • Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut; • Melakukan Rapat Kerja Teknis dengan BPTD terkait pelaksanaan pemberian subsidi yang berupa bantuan biaya operasional angkutan jalan perintis sesuai dengan Keputusan Dirjen Hubdat No. 89/DIRJ/2020 Tahun 2020; dan • Berkoordinasi dengan Badan Perencanaan, Setelidng Hubdat terkait pengawanan angkutan jalan perintis menggunakan GPS dan aplikasi MITRA DAMAI. • Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut.	• Dit. AI • Dit. PTT • Dit. TSDP
		RP 5 Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan	rasio	0,636	• Subsidi Perawatan Bus The Service • Fleet Management System operasional angkutan perkotaan dengan skema Buy The Service • Kegiatan Sewa Perangkat Tap on Bus dan Jasa Settlement beserta Rekonstruksi Duta Pembayaran Turf Layanan Buy The Service • Pendampingan Manajemen Proyek Pengembangan Angkutan Massal berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan	Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan	0,636	0,636	100%	Rp 535.934.071,000	100%	0,636	Rp 56.872.885,229	100,00%	10,61%	• Peningkatan jumlah Load Factor Tahun 2023 sebesar 38,74% menunjukkan jayanya BTS semakin meningkat dan cukup diminati oleh Masyarakat; • Adanya Layanan program subsidi Buy The Service dapat meningkatkan Pendapatan Negara Bulanan Pajak (PNBP); • Adanya Layanan program subsidi Buy The Service dapat meningkatkan pendapatan/meningkatkan masyarakat dari kendaraan pribadi ke angkutan umum; • Layanan Angkutan umum yang nyaman sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam melakukan mobilitas atau pergerakan sehari - hari; • Adanya Pengembalian program layanan bus the service ke pemerintah daerah sehingga dapat melayani program BTS ke daerah lain yang memerlukan;	• Pelaksanaan kondisi yang membahas rencana pengembangan angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan di suatu wilayah; • Melakukan review terhadap regulasi terkait pelaksanaan program pengembangan angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan dengan skema buy the service; • Mengajukan usulan tarif layanan BTS masa keabadian Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang jenis dan tarif PNBP yang bersifat volatil; • Perencanaan yang komprehensif dalam membentuk lokasi yang akan dipilih untuk penerapan program buy the service dengan memperhatikan RPJMN dan Rencana; • Komitmen antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam program pengembangan dan peningkatan pelayanan angkutan perkotaan; • Sosialisasi penyelenggaraan Program Buy the Service kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat; • Melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan program buy the service secara reguler; • Pengembangan dan peningkatan sistem IT pada layanan Buy The Service; • Memanfaatkan alternatif pembiayaan dari sumber pendanaan lain untuk pengembangan program buy the service.	Di. AI
2	SP2 Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perhubungan	RP 2 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat	Nilai	94,057	Pembinaan dan Evaluasi Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Ditjen Hubdat	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat	94,057	94,057	100%	Rp 133.773,000	100%	95,143	Rp -	101,15%	0,00%	• Masih didapat pengguna jasa yang belum seluruhnya mendapatkan kualitas pelayanan yang baik • Masih banyak didapat pengguna jasa yang belum memiliki handphone/gadget • Masih belum maksimalnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Survey Kepuasan Masyarakat	• Melakukan sosialisasi kepada perusahaan angkutan jalan terkait standar pelayanan minimal angkutan jalan; • Melakukan apresiasi kepada perusahaan angkutan jalan yang telah memberikan pelayanan angkutan terbaik kepada masyarakat melalui kegiatan pemilihan PD terbaik; • Mengadakan Bimbingan Teknis Aplikasi SA-KM-PM kepada seluruh penyedia pelayanan SSM • Mengadakan pendampingan pelaksanaan SSM secara bertahap • Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan SSM • Tidak lanjut atau hasil esial; • Menyediakan Fasilitas yang memadai untuk pengguna jasa yang tidak ada gadget untuk melakukan SSM • Melakukan perbaikan pelayanan dengan melakukan perbaikan pada aplikasi AIR SDP sehingga lebih memudahkan pengguna jasa untuk memproses pengajuan pelayanan; • Melakukan perbaikan komunikasi terhadap pengguna jasa dan melakukan sosialisasi secara masif terhadap pengguna layanan sehingga ke depan dapat terwujud sinergitas terhadap layanan perlintas Direktorat Transportasi SDP.	Bagian SDM dan Umum, Setelidng Hubdat
		RP 6 On Time Performance (OTP) Transportasi SDP	%	83,513	• Pengawasan Pelaksanaan dan Pemantauan kegiatan Insidendi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi • Persewaan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Baru	On Time Performance (OTP) Transportasi SDP	83,513	83,513	100%	Rp 275.000,000	100%	83,533	Rp 84.323.716	100,00%	30,66%	• Pelaksanaan online tracking angkutan penyeberangan baru diterapkan pada Pelabuhan Penyeberangan Merak, Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Pelabuhan Penyeberangan Ketapang dan Pelabuhan Penyeberangan Gilimanau tetapi belum diterapkan pada perubahan penyeberangan lain yang terdapat pada PA 19 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tiket Angkutan Penyeberangan Secara Elektronik; • Pada beberapa lintas terkendala gangguan surut air pelayaran sehingga membutuhkan waktu lebih ketika akan sandar; • Pada beberapa lintas terkendala fasilitas dermaga sementara jumlah kapal yang banyak, sehingga harus menunggu giliran untuk sandar dan melakukan bongkar muat; • Adanya keterlambatan pelayanan yang disebabkan oleh kapal yang gagal sandar karena kondisi telesi atau cuaca	• Melaksanakan kegiatan Sosialisasi/Bimbingan Teknis SPM Angkutan Penyeberangan; • Pelaksanaan online tracking angkutan penyeberangan baru diterapkan pada Pelabuhan Penyeberangan Merak, Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Pelabuhan Penyeberangan Ketapang dan Pelabuhan Penyeberangan Gilimanau tetapi belum diterapkan pada perubahan penyeberangan lain yang terdapat pada PA 19 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tiket Angkutan Penyeberangan Secara Elektronik; • Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan dan ketepatan jadwal di lapangan; • Melakukan pengawasan secara periodik terhadap ketepatan jadwal di lapangan; • Melakukan evaluasi atas pelaksanaan pola operasi dan ketepatan jadwal; • Dukungan sistem Digitalisasi Pengawasan Operasional untuk pengawasan operasional di lapangan.	Di. TSDP
		RP 7 On Time Performance (OTP) Transportasi Perkotaan	%	33,655	• Subsidi Perawatan Bus The Service • Fleet Management System operasional angkutan perkotaan dengan skema Buy The Service • Kegiatan Sewa Perangkat Tap on Bus dan Jasa Settlement beserta Rekonstruksi Duta Pembayaran Turf Layanan Buy The Service • Pendampingan Manajemen Proyek Pengembangan Angkutan Massal berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan	On Time Performance (OTP) Transportasi Perkotaan	33,655	33,655	100%	Rp 535.934.071,000	100%	49,086	Rp 56.872.885,229	145,85%	10,61%	• Adanya migrasi teknologi dari Teman Bus ke Mitra Darat memerlukan waktu penyesuaian komponen teknologi yang ada • Belum terdapatnya antara layanan angkutan umum perkotaan Buy The Service sebagai Turf Line Trayek Utama dengan Angkutan Pengangan (Freder) seperti angkutan dan belum maksimalnya dukungan dari Feeder sehingga dapat mempengaruhi waktu tempuh layanan BTS • Dimanika masyarakat di lapangan yang sering terbalik sehingga sering dilakukan pengalihan rute sementara	• Pemanfaatan teknologi ITS Bus Priority untuk memberikan prioritas bagi angkutan umum; • Berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan perkotaan dan ketepatan jadwal di lapangan, misalnya dengan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas seperti pembatasan kecepatan bagi kendaraan pribadi di suatu ruas jalan tertentu; • Melakukan evaluasi secara periodik terhadap realitas On Time performance; • Melakukan rapat evaluasi efektifitas pengaturan manajemen dan rekayasa lalu lintas dan hal terkait lainnya	Di. AI

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	TARGET BULAN 3		REALISASI BULAN 3		% CAPAIAN BULAN 3		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB				
								TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN							
								volume	%	Volume	%	%	%							
3	SFS Meningkatkan Keselamatan Transportasi	RP 3 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi jalan per 10.000 keberangkatan	rasio	0,008	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan Teknis Manajemen Batas Kecepatan Pembinaan Teknis Perusahaan APM dan Importir Kendaraan Bermotor Pembinaan Teknis Pengoper Pemeriksa BAF Rancangan Bangun Kendaraan Bermotor Pembinaan Teknis Perusahaan Kargo/ Kendaraan Bermotor Inspeksi Keselamatan Kapal Sarana Angkutan Lembangan Nalud dan Tahun Baru (Rampcheck) Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi Angkutan Orang Bimbingan Teknis Manajemen Kampanye Keselamatan Transportasi Jalan Pembinaan Teknis Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Monitoring Pembinaan Keselamatan Angkutan Umum (Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan) Program Asli Keselamatan Berkendara Bimbingan Teknis Keselamatan Jalan Anak Usia Sekolah Monitoring dan Evaluasi Keselamatan Transportasi Jalan Pembinaan Teknis Penilai Dokumen SMK PAU (Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Promosi dan Kampanye Keselamatan Forum LLAJ Bidang Keselamatan Jalan Harmonisasi RUNE 	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi jalan per 10.000 keberangkatan	0,008	0,008	100%	Rp	6.200.000,000	100%	0	Rp	805.756.774	200,00%	13,00%	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan angkutan umum yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) masih sangat sedikit, sampai Desember tahun 2023 sebanyak 127 perusahaan yang memiliki sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan dari kurang lebih 31.657 Perusahaan Angkutan Umum (PAU), hal tersebut dikarenakan belum diterapkannya sanksi bagi perusahaan angkutan yang belum menerapkan sehingga kesadaran akan hal tersebut masih sangat rendah dan dianggap tidak penting; Belum diterapkannya sanksi bagi perusahaan angkutan yang belum menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) Perusahaan Angkutan Umum; Belum satu tujuannya perusahaan angkutan umum dengan pemerintah akan pentingnya keselamatan, keefektifan merupakan investasi sedangkan perusahaan masih beranggapan bahwa keselamatan merupakan sebuah art cost bagi perusahaan itu sendiri; Kurangnya kesadaran Perusahaan Angkutan Umum akan pentingnya Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan mengurangi angka kecelakaan dan fatalitas. 	<ul style="list-style-type: none"> Akan disempurnakan peraturan terkait Sistem Manajemen Keselamatan pada perusahaan angkutan umum (SMK) terkait dengan pembagian wewenang antara pusat dan daerah dalam hal pembinaan keselamatan angkutan umum; Akan diatur regulasi terkait dengan penyediaan fasilitas tempat istirahat pengemudi angkutan umum; Akan diberikan reward kepada perusahaan angkutan umum yang sudah menerapkan SMK dan akan mendorong kepada perusahaan angkutan umum untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan pada perusahaannya dengan melakukan sistem atau pendampingan dalam penerapan SMK; Melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang keselamatan secara menyeluruh baik offline maupun online (melalui media elektronik, media sosial dll); Mengembangkan public figure untuk mengkampanyekan keselamatan jalan sehingga meningkatkan awareness masyarakat terhadap keselamatan jalan; Melakukan Pelatihan Kompetensi Inspektur dan Auditor Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum, dengan mengikutsertakan 33 (tiga puluh tiga) Balai Pengelola Transportasi Darat; Melaksanakan Pembekalan dan pendampingan Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan terhadap Perusahaan Angkutan Umum, baik AAAP/Perwilata maupun Angkutan Barang Khusus (BK); Melaksanakan Bimbingan Teknis Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum, dengan mengikutsertakan 33 (tiga puluh tiga) Balai Pengelola Transportasi Darat; Melaksanakan Program Ases Peningkatan Kualitas Mental dan disiplin Pengemudi Angkutan umum; Melaksanakan Training Of Trainer (TOT) Sistem Manajemen Angkutan Umum Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU) dalam rangka meningkatkan Kompetensi SDM Penilai SMK PAU; Melaksanakan Ramp Check Angkutan Umum; Monitoring dan Evaluasi Keselamatan Transportasi Jalan; Melakukan Monitoring Pembinaan Angkutan Umum AAAP/Perwilata maupun Angkutan Barang (BK); Utama mengoptimasi pendants dan pengisian penangan SMK pada perusahaan angkutan umum akan dibagikan sistem informasi SMK pada perusahaan angkutan umum (SI-PONAM) 	Dr. Sarana Tj
						RP 2 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran	rasio	0,033	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penegakan Hukum Bidang TSP Monitoring dan Pemantauan Kecelakaan Kapal Sungai Danau dan Penyeberangan 	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran	0,033	0,033	100%	Rp	950.000,000	100%	0	Rp	27.350.000	200,00%
4	SP4 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum	RP 1 Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat Class Action oleh Masyarakat Dibandingkan Dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Diwawakan/Ditetapkan	%	0,000	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Workshop Peraturan Perundang-undangan Pelaksanaan Advokasi dan Pertimbangan Hukum Bidang Perhubungan Darat 	Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat Class Action oleh Masyarakat Dibandingkan Dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Diwawakan/Ditetapkan	0,000	0,000	100%	Rp	4.151.324,000	100%	0,000	Rp	977.871,805	200,00%	23,56%	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan evaluasi terhadap peraturan yang telah baru ditetapkan Melakukan evaluasi terhadap sosialisasi dan uji publik yang telah dilakukan. Melakukan sosialisasi terhadap operator langsung terkait peraturan yang baru ditetapkan 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan komitmen Pimpinan Tinggi untuk lebih mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat; Melakukan sosialisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang lebih menyeluruh pada seluruh unit kerja dan pegawai di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat; Melakukan pendampingan kepada seluruh unit kerja langsung terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi di unit kerjanya; Melakukan Pengawasan dan Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Hubudat; Melaksanakan tindak lanjut perbaikan atas hasil Pengawasan dan Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Hubudat 	Bagian Hukum dan Hukum, Setdjen Hubudat
5	SP5 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	RP 1 Indeks RB Kementerian Perhubungan	Nilai	80,500	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Budaya Birokrasi BERAKHLAK dengan ASN yang Profesional di Lingkungan Ditjen Hubudat Penyusunan, Revisi dan Evaluasi Papis Bisnis dan Penerapan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Ditjen Hubudat Revisi dan Evaluasi SOP di Lingkungan Ditjen Hubudat Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Ditjen Hubudat Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI di Lingkungan Ditjen Hubudat Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Ditjen Hubudat Pembinaan dan Evaluasi Dengar Keluhan di Lingkungan Ditjen Hubudat Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Standar Pelayanan serta Kualitas Pelayanan Publik Evaluasi Kelembagaan di Lingkungan Ditjen Hubudat Pembinaan dan Evaluasi Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Ditjen Hubudat 	Indeks RB Kementerian Perhubungan	80,500	80,500	100%	Rp	883.215,000	100%	77,450	Rp	-	96,21%	0,00%	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan reformasi birokrasi pada tingkat Eelon 1 sudah berjalan sesuai arahan Leading Sector, namun belum terinternalisasi secara menyeluruh hingga ke tingkat kerja dibawahan; Monitoring dan evaluasi rencana kerja pelaksanaan reformasi birokrasi di level unit kerja belum seluruhnya dilakukan; Sebelum peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/inkonon penditerikan dan dipetakan dengan baik namun hasil identifikasi hasil analisis tersebut belum sepenuhnya dibenarkan/ ditanggapi sehingga belum dapat dipastikan kebijakan yang dibuat oleh Ditjen Perhubungan Darat harmonis dengan kebijakan lain; Belum optimalnya evaluasi terhadap kesesuaian organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan dan mndat kepada unit kerja; Pengaturan sistem manajemen SDM belum sepenuhnya optimal, hal ini disebabkan antara lain belum dilakukannya pemetaan talenta sebagai dasar penempatan jabatan kritik/lokalisasi serta penyusunan perencanaan pengembangan kompetensi pegawai atau Human Capital Development Plan (HCDP) yang belum dilakukan secara menyeluruh serta pola rotasi dan mutasi yang dilakukan secara massal belum didasarkan pemetaan kompetensi yang jelas; Monitoring dan evaluasi implementasi penguatan kebijakan pengawasan internal dan integritas masih belum mengurug tingkat efektifitas penguatan regulasi, penerapan SOP, pengalihan pengabdian masyarakat, White Blowing System dan kebijakan bantuan kepengantar; Implementasi pelayanan publik belum sepenuhnya optimal, hal ini ditunjukkan dengan masih sedikitnya unit kerja yang telah menindaktipkan hasil survei kepuasan masyarakat dan menerapkan kebijakan pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar. 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan komitmen Pimpinan Tinggi untuk lebih mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat; Melakukan sosialisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang lebih menyeluruh pada seluruh unit kerja dan pegawai di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat; Melakukan pendampingan kepada seluruh unit kerja langsung terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi di unit kerjanya; Melakukan Pengawasan dan Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Hubudat; Melaksanakan tindak lanjut perbaikan atas hasil Pengawasan dan Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Hubudat 	Bagian SDM dan Umum, Setdjen Hubudat